

**SEJARAH PERKEMBANGAN MELAWI PADA  
MASA KESULTANAN ABDUL KADIR  
TAHUN 1875-1995**

**Sertika<sup>1</sup>, Muhammad Syaifulloh<sup>2</sup>, Muhammad Sadikin<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
Program Studi Pendidikan Sejarah  
Universitas PGRI Pontianak

e-mail : [sartikamonal16@gmail.com](mailto:sartikamonal16@gmail.com)<sup>1</sup>, [ipulloh311@gmail.com](mailto:ipulloh311@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sadikinmuhammad87@gmail.com](mailto:sadikinmuhammad87@gmail.com)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji sejarah perkembangan wilayah Melawi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadir (1845–1875), seorang tokoh penting dalam sejarah lokal Kalimantan Barat. Latar belakang penelitian ini adalah minimnya studi akademik yang menyoroti kontribusi Sultan Abdul Kadir dalam membangun fondasi politik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Melawi di tengah tekanan kolonial Belanda. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi peran Sultan Abdul Kadir dalam membangun pemerintahan berbasis musyawarah dan hukum adat, memperkuat kerukunan antar-etnis dan agama, serta mempertahankan kemandirian ekonomi lokal. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis sumber primer dan sekunder, termasuk karya Mahdar Hamdani dan peneliti lokal lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sultan Abdul Kadir menerapkan kepemimpinan visioner dan inklusif dengan mengedepankan diplomasi adat, musyawarah desa, penghormatan nilai lokal, dan penguatan gotong royong. Di bidang ekonomi, ia mendorong pertanian, perdagangan hasil hutan, dan sistem pajak berbasis kontribusi lokal untuk menolak dominasi kolonial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan Sultan Abdul Kadir menjadi tonggak penting dalam mempertahankan identitas budaya, otonomi politik, dan ketahanan ekonomi masyarakat Melawi, serta menjadi model perlawanan non-kekerasan terhadap kolonialisme.

**Kata kunci:** Perkembangan Melawi, Kesultanan Abdul Kadir

**Abstract**

*This study examines the historical development of the Melawi region during the reign of Sultan Abdul Kadir (1845–1875), a pivotal figure in the local history of West Kalimantan. The background of this research lies in the scarcity of academic studies that highlight Sultan Abdul Kadir's contributions to building the political, social, cultural, and economic foundations of Melawi society amid Dutch colonial pressures. The main objective is to reconstruct his role in establishing a government grounded in deliberation and customary law, fostering interethnic and interreligious harmony, and maintaining local economic autonomy. The research employs a historical method with a qualitative approach, utilizing literature studies and analysis of primary and secondary sources, including the works of Mahdar Hamdani and local researchers. Findings reveal that Sultan Abdul Kadir practiced visionary and inclusive leadership, prioritizing customary diplomacy, village deliberation, respect for local values, and the strengthening of communal cooperation. In the economic sphere, he promoted sustainable agriculture, forest-product trade, and a locally determined tax system as a means to resist colonial control. This research concludes that Sultan Abdul Kadir's leadership represents a crucial period in safeguarding cultural identity, political autonomy, and economic resilience in Melawi. His approach demonstrates that resistance to colonialism can be conducted through peaceful yet firm strategies rooted in local wisdom, social dialogue, and economic self-reliance.*

**Keywords:** Development of Melawi, Abdul Kadir Sultanate.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah panjang yang kaya dengan keberadaan berbagai kerajaan dan kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara. Kesultanan tidak hanya berperan sebagai sistem pemerintahan tradisional yang dipimpin sultan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga sebagai pusat penyebaran agama, budaya, integrasi sosial, serta penggerak ekonomi masyarakat (Azra, 2017). Kajian mendalam tentang sejarah kesultanan menjadi penting untuk memahami dinamika politik tradisional, struktur sosial, dan perkembangan budaya Indonesia pada masa lalu. Penelitian sejarah lokal yang detail juga membantu membangun narasi sejarah nasional yang lebih inklusif dan beragam (Hariyono, 2019).

Namun pada kenyataannya, masih banyak sejarah kesultanan lokal yang belum digali secara mendalam. Salah satunya adalah sejarah Kesultanan Melawi di pedalaman Kalimantan Barat. Wilayah Melawi pernah menjadi bagian penting dalam pengaruh Kesultanan Sintang dan memiliki sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda yang dipimpin oleh tokoh lokal, Abdul Kadir atau Raden Temenggung Setia Pahlawan. Sayangnya, kontribusi penting Abdul Kadir dan Kesultanan Melawi belum menjadi fokus penelitian sejarah yang serius. Literatur yang ada umumnya hanya menyebut Melawi sebagai wilayah pinggiran Kesultanan Sintang tanpa membahas lebih detail struktur

kekuasaan tradisionalnya, dinamika sosial-budayanya, atau strategi perlawanannya terhadap kolonialisme.

Penelitian sejarah lokal seperti ini penting karena sejarah bukan hanya tentang narasi besar di tingkat nasional, tetapi juga tentang bagaimana komunitas-komunitas lokal berperan dalam membentuk identitas bangsa (Utomo, 2021). Sejarah lokal juga membantu memahami integrasi sosial dan dinamika multietnis di daerah seperti Kalimantan Barat yang dihuni oleh berbagai kelompok Dayak dan Melayu. Sebelum abad ke-19, Melawi dihuni oleh berbagai kelompok etnis Dayak seperti Kenyah, Kebahan, Seberuang, dan lainnya, yang hidup dalam sistem adat, dipimpin kepala suku atau temenggung, serta menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kehidupan mereka banyak bergantung pada bertani, berburu, dan berdagang lewat jalur sungai yang menjadi sarana utama interaksi ekonomi (Syahrin, 2018).

Pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19, pengaruh Kesultanan Pontianak dan Sintang semakin kuat di Melawi, memicu perubahan sosial-politik yang lebih terstruktur dan terorganisir. Abdul Kadir, yang lahir di Sintang pada 1771 dari keluarga bangsawan, menjadi tokoh sentral dalam sejarah Melawi. Ia dikenal memiliki semangat juang, jiwa patriotik, serta kepedulian pada pemerintahan dan keamanan. Ia mendapatkan pendidikan nonformal dari keluarga dan

ulama yang menekankan nilai agama dan moral, membentuk pandangan kepemimpinannya yang memadukan adat lokal dan nilai Islam (Arifin, 2020).

Tahun 1845, Abdul Kadir diangkat menjadi pemimpin di Onderafdeling Melawi menggantikan ayahnya. Ia memimpin dengan pendekatan musyawarah dan gotong royong untuk mempersatukan masyarakat Dayak dan Melayu, membangun ekonomi lokal, dan memperkuat pengajaran agama. Ia juga menolak intervensi berlebihan Belanda, bahkan menolak gelar resmi yang ditawarkan pihak kolonial. Kesetiaannya pada Kesultanan Sintang membuatnya dianugerahi gelar “Raden Temenggung” dan kemudian “Setia Pahlawan” oleh Sultan Sintang.

Kepemimpinan Abdul Kadir berdampak pada penguatan persatuan antaretnis, pembangunan infrastruktur sederhana, pengembangan pertanian dan perdagangan lokal, serta transformasi budaya lewat penyebaran Islam yang memperkuat peran adat dan ulama dalam struktur pemerintahan tradisional. Sayangnya, kontribusi Abdul Kadir dalam perlawanan terhadap kolonialisme dan pembangunan kesultanan lokal masih kurang mendapat perhatian dalam kajian sejarah Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuannya adalah mendokumentasikan secara lebih lengkap sejarah Kesultanan Abdul Kadir di Melawi, termasuk struktur kekuasaan

tradisionalnya, integrasi sosial-budaya Dayak dan Melayu, serta strategi menghadapi kolonialisme. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya historiografi Indonesia, memperkuat identitas budaya lokal, dan menjadi inspirasi dalam membangun nasionalisme yang berakar pada kearifan lokal.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Peneliti memilih metode sejarah karena metode ini dianggap tepat untuk menjawab masalah tentang perkembangan wilayah Melawi pada masa Kesultanan Abdul Kadir tahun 1845–1875.

Menurut Utomo (2021: 45), metode sejarah adalah cara kerja ilmiah untuk meneliti, menafsirkan, dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis berdasarkan sumber-sumber sejarah. Metode ini dilakukan melalui empat tahap utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (penulisan sejarah). Dengan metode sejarah, peneliti dapat menggali data tentang struktur kekuasaan tradisional, dinamika sosial-budaya, dan strategi perlawanan kolonial di Melawi secara lebih mendalam dan terstruktur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

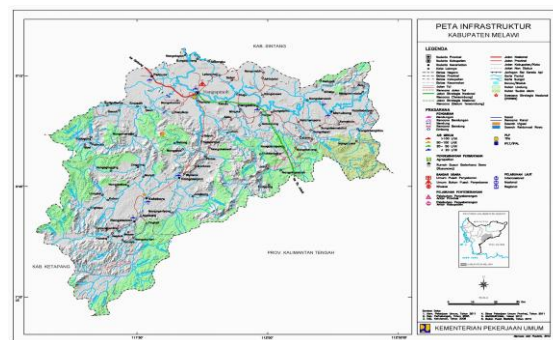
### Hasil

#### 1. Latar Belakang Berdirinya Kesultanan Abdul Kadir Di Wilayah Melawi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, sebuah wilayah yang memiliki nilai historis penting sebagai pusat berdirinya Kesultanan Abdul Kadir pada pertengahan abad ke-19. Kabupaten Melawi merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sintang yang diresmikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003. Keberadaan wilayah ini bukan hanya penting secara administratif dan geografis, tetapi juga menyimpan jejak sejarah sosial-politik yang signifikan pada masa kolonial. Penelitian ini berfokus untuk menelusuri kembali dinamika pembentukan kekuasaan lokal di Melawi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kadir, sekaligus menggambarkan kondisi umum wilayah yang menjadi latar bagi perkembangan Kesultanan tersebut.

Kabupaten Melawi secara geografis terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat, pada koordinat antara 0°17'–1°26' Lintang Selatan dan 111°01'–112°40' Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 10.640 km<sup>2</sup> dan secara administratif terbagi ke dalam sebelas kecamatan, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Nanga Pinoh. Kabupaten Melawi

berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu di sebelah utara, Kabupaten Sintang di sebelah barat, Kabupaten Sekadau di sebelah selatan, dan Kabupaten Ketapang di sebelah timur. Letak strategis Melawi didukung oleh keberadaan Sungai Melawi yang menjadi jalur utama transportasi dan komunikasi sejak masa lampau. Menurut Syahrin (2018: 85), sungai-sungai besar di Kalimantan Barat berfungsi sebagai penghubung antara pedalaman dan pesisir, menjadi sarana penting dalam perdagangan lokal serta penyebaran budaya dan agama. Keberadaan sungai juga mempermudah interaksi antar-etnis dan antar-daerah, sehingga mendukung integrasi sosial dan mobilitas penduduk di kawasan ini.



**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Melawi Sekarang**  
(Sumber: BPS Kabupaten Melawi / Peta.web.id)

Secara topografi, wilayah Melawi terdiri atas dataran rendah di sepanjang sungai dan daerah perbukitan pada bagian pedalaman, dengan hutan hujan tropis yang masih mendominasi sebagian besar kawasan. Iklimnya termasuk tropis basah

dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun, yang mendukung kegiatan pertanian, perikanan air tawar, dan pemanfaatan hasil hutan. Kondisi geografis ini memengaruhi pola permukiman masyarakat yang umumnya memanjang mengikuti aliran sungai utama dan anak-anak sungainya. Seperti dijelaskan oleh Haryono dan Wulandari (2021: 88), wilayah pedalaman Kalimantan, termasuk Melawi, menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas.



**Gambar 2.2 Peta Melawi pada Masa Kolonial (ca. 1899–1900)**

(Sumber: Wikimedia Commons – Kaart van Borneo 1899)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi (2023), jumlah penduduk Kabupaten Melawi diperkirakan mencapai sekitar 231.180 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 22 orang per km<sup>2</sup>. Persebaran penduduk cenderung memusat di sepanjang Sungai Melawi dan anak-anak

sungainya, dengan konsentrasi tertinggi di pusat pemerintahan Nanga Pinoh. Komposisi penduduk Melawi bersifat multietnis, terdiri dari suku Dayak (termasuk sub-suku Kenyah, Kebahan, Seberuang), suku Melayu, Jawa, Bugis, Madura, dan Tionghoa. Keberagaman etnis ini mendorong terciptanya dinamika sosial yang unik, dengan nilai-nilai gotong royong, toleransi antaragama, dan penghormatan terhadap adat istiadat yang terus dipertahankan (BPS Kabupaten Melawi, 2023).

Masyarakat Melawi dikenal memiliki struktur sosial yang multietnis. Suku Dayak mendominasi wilayah pedalaman, sedangkan suku Melayu umumnya mendiami wilayah sungai dan dataran rendah. Selain itu, suku Jawa, Bugis, Madura, dan etnis Tionghoa juga turut hadir sebagai bagian dari proses migrasi dan pembauran yang terjadi sejak masa kolonial. Menurut Fitriani dan Nugroho (2021: 110), keberagaman etnis ini menciptakan dinamika sosial yang khas di Melawi, di mana nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan adat-istiadat lokal tetap dijaga meskipun masyarakat berasal dari berbagai latar budaya.

Sebelum kedatangan Abdul Kadir, wilayah Melawi berada dalam kekuasaan Kesultanan Sintang dan dipimpin secara adat oleh para kepala suku (temenggung). Sistem kepercayaan masyarakat saat itu

masih bercorak animisme dan dinamisme, yang terlihat dalam tradisi ritual dan penghormatan terhadap roh leluhur. Namun demikian, jalur perdagangan sungai membuka akses interaksi dengan pihak luar, termasuk ulama dan saudagar dari Kesultanan Pontianak yang memperkenalkan ajaran Islam (Yuliani, 2018: 60–65). Abdul Kadir, seorang bangsawan keturunan Jawa-Sintang yang lahir di Sintang tahun 1771, datang ke Melawi untuk menggantikan ayahnya, Urip Abdul Azis, sebagai pemimpin lokal. Kedatangannya menandai awal terbentuknya struktur kekuasaan baru yang terorganisir, dengan menggabungkan sistem pemerintahan Islam, penguatan hukum adat, serta diplomasi terhadap kelompok suku dan kekuatan kolonial. Pratama (2020: 22–28) mencatat bahwa kemampuan Abdul Kadir dalam mempersatukan suku Dayak dan Melayu, serta membentuk pemerintahan berbasis musyawarah dan adat, menjadi fondasi awal Kesultanan Melawi yang eksis hingga akhir abad ke-19.

Keberhasilan Abdul Kadir tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan strategi pendekatannya yang mengedepankan dialog budaya serta kearifan lokal. Menurut Rencana Usulan Pahlawan Nasional (Kemendikbudristek, 2022: 12), Abdul Kadir juga dikenal sebagai tokoh yang menjaga perdamaian

antar-suku, menolak dominasi Belanda secara halus, dan tetap loyal terhadap Sultan Sintang. Hal inilah yang membuat wilayah Melawi pada masanya menjadi stabil dan berkembang dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Abdul Kadir, yang kemudian bergelar Raden Temenggung Setia Pahlawan, adalah pendiri Kesultanan Melawi pada pertengahan abad ke-19. Ia berasal dari garis bangsawan Matan Tanjungpura yang berpengaruh di Kalimantan Barat. Anak dari Pangeran Urip Abdul Azis Kartiko Aryo Utomo, Abdul Kadir adalah keturunan langsung Pangeran Tobah—sosok penting dalam trah kerajaan Matan. Silsilah ini bisa dilacak hingga lima generasi yang tidak hanya mewarisi darah bangsawan tetapi juga peran penting dalam penyebaran Islam, pelestarian adat, dan integrasi sosial di Melawi (Pratama, 2020: 32–33).

Generasi pertama adalah Pangeran Urip Abdul Azis Kartiko Aryo Utomo. Ia sosok karismatik yang membawa tata kelola sosial berbasis Islam dan adat Melayu ke hulu Sungai Melawi pada awal abad ke-19. Berasal dari trah Kerajaan Matan Tanjungpura, Pangeran Urip memimpin masyarakat Dayak dan Melayu setempat melalui pendekatan damai, membangun surau, mengajarkan agama, serta menjadi mediator antar-suku. Pernikahannya dengan perempuan

bangsawan Melayu-Dayak dari Nanga Pinoh memperkuat posisi sosial-politik dan melahirkan generasi penerus yang berpendidikan agama (Pratama, 2020: 34–149).

Putra sulungnya, Abdul Kadir, menjadi generasi kedua. Sebagai pendiri resmi Kesultanan Melawi pada 1845, Abdul Kadir menggabungkan hukum Islam, adat Melayu, dan permusyawaratan Dayak. Ia memimpin dari Saka Dua, mendirikan surau dan madrasah, mengundang ulama, membangun jalur perdagangan sungai, serta menjaga kerukunan antar-etnis. Gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan dianugerahkan atas kepemimpinannya yang berani dan visioner. Ia menikah dengan perempuan bangsawan setempat, memperkuat legitimasi politik, dan memiliki keturunan yang kelak membentuk jaringan aristokrasi Melawi (Pratama, 2020: 34–149).

Generasi ketiga dilanjutkan oleh Abdul Kahar atau Jigut, bergelar Raden Mas Setia Muda. Sebagai sultan kedua, ia menghadapi tekanan kolonial Belanda dengan diplomasi cermat, menjaga otonomi adat dan agama, membina hubungan dengan pemerintah kolonial tanpa kehilangan identitas lokal. Ia memperkuat pendidikan Islam, membangun madrasah, memediasi konflik adat, dan mengembangkan perdagangan

hasil hutan. Pernikahannya dengan bangsawan Melayu-Dayak dari Ella Hilir mempererat jaringan kekuasaan. Ia dikenang sebagai pemimpin bijak yang menyeimbangkan diplomasi dan ketegasan (Pratama, 2020: 34–149).

Abdul Jabar atau Raden Mas Setia Jaya adalah generasi keempat yang memerintah pada awal abad ke-20. Menghadapi pengaruh kolonial yang semakin besar, ia menolak tunduk total dengan memperkuat perlawanan kultural melalui agama. Ia mendorong pembangunan surau dan madrasah, mendidik masyarakat hidup lebih taat beragama, dan menggandeng ulama dalam pemerintahan. Kesultanan Melawi di eranya bertransformasi dari entitas politik menjadi pusat spiritual dan pendidikan Islam. Pernikahannya dengan bangsawan Belimbing Hulu melahirkan keturunan yang menjadi tokoh agama, penggerak ekonomi, dan pendidikan perempuan (Pratama, 2020: 34–149).

Generasi kelima diwakili oleh Haji Abdul Rakhman, putra Abdul Jabar. Ia tumbuh dalam pendidikan Islam yang kuat dan mendapat penghormatan masyarakat berkat gelar hajinya. Hidup di masa pemerintahan kolonial yang menghapus sistem kesultanan, Haji Abdul Rakhman beralih peran menjadi pemimpin spiritual, guru masyarakat, dan penjaga adat. Ia membina pengajian, mendukung surau,

menjadi penengah konflik antar-suku, serta mendorong pendidikan Islam hingga ke luar daerah. Ia dikenang bukan sebagai sultan formal, melainkan simbol transisi dari kekuasaan politik menuju kepemimpinan moral. Warisan utamanya adalah nilai-nilai spiritual, adat, dan pendidikan Islam yang terus dihormati keturunannya hingga kini (Pratama, 2020: 34–149).

Raden Temenggung Abdul Kadir berasal dari keluarga bangsawan Melayu Melawi yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Pontianak, namun bersifat setara dan tidak subordinatif. Ayahnya dihormati sebagai penghubung masyarakat dengan pihak luar, sementara ibunya berasal dari keluarga terpandang yang memperkuat status sosialnya. Lingkungan keluarga ini menanamkan ajaran Islam, adat Melayu, dan nilai kepemimpinan (Pratama, 2020: 151–154).

Pendidikan Abdul Kadir bersifat non-formal, berpusat di surau/langgar keluarga dengan pengajaran Al-Qur'an, fiqih, akhlak, sejarah Nabi, serta adat-istiadat Melayu. Ia belajar diplomasi adat dengan mendampingi ayahnya dalam sidang adat dan mediasi konflik. Interaksinya dengan masyarakat Dayak membuatnya memahami bahasa dan adat lokal, membangun diplomasi lintas budaya. Selain itu, ia terlibat dalam perdagangan lokal di Sungai Melawi

hingga Sintang dan Pontianak (Pratama, 2020; Fitriani & Nugroho, 2021; Yuliani, 2018).

Pada 1845, ia diangkat menjadi Raden Temenggung Setia Pahlawan menggantikan ayahnya. Gelar itu disahkan Sultan Sintang atas jasanya menjaga stabilitas dan meredam konflik antarsuku. Meski pemerintah Belanda memuji jasanya dan memberi hadiah 2.500 gulden pada 1866, ia menolak secara pribadi namun menerima gelar “Setia Pahlawan” atas perintah Sultan Sintang (Pratama, 2020: 153; Kemendikbudristek, 2022).

Kesultanan Melawi muncul sebagai respon atas meningkatnya minat kolonial Belanda terhadap pedalaman Kalimantan Barat dan klaim Kesultanan Pontianak atas wilayah Melawi. Masyarakat lokal khawatir kehilangan kebebasan adat sehingga mendorong pembentukan kesultanan sebagai simbol kedaulatan dan perlindungan identitas budaya (Pratama, 2020: 174–180).

Musyawarah adat Melayu dan Dayak sepakat mengangkat Abdul Kadir sebagai Sultan Melawi. Upacara pengukuhan dilaksanakan secara adat dengan simbol-simbol pusaka, disahkan Sultan Sintang, dan dihadiri berbagai perwakilan wilayah Melawi. Meski Asisten Residen Belanda turut hadir dalam audiensi pasca-pengukuhan, Abdul Kadir menegaskan legitimasinya bersumber dari



konsensus lokal, bukan Belanda. Ia kemudian membangun struktur pemerintahan, hukum adat, dan hubungan diplomatik dengan wilayah tetangga (Pratama, 2020: 175–180; Kemendikbudristek, 2022).

Belanda mencoba menaklukkan Melawi dengan mendorong Kesultanan Pontianak untuk mengklaim wilayah tersebut dan melalui jalur diplomasi. Ketika gagal, Belanda mengirim ekspedisi untuk memetakan kondisi sosial-politik dan menawarkan jabatan kepada tokoh lokal. Abdul Kadir merespons dengan melarang rakyat berdagang di bawah kontrol Belanda dan menegaskan kedaulatan wilayah (Pratama, 2020: 157–164; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Ia menggalang solidaritas adat, memperingatkan bahaya kolonialisme, dan menolak hadiah atau intervensi ekonomi Belanda. Masyarakat Melawi mendukung sikap tersebut dengan membatasi interaksi dan mempertahankan kemandirian (Pratama, 2020).

## **2. Perkembangan Melawi Tahun 1845–1875**

Pada rentang tahun 1845 hingga 1875, wilayah Melawi mengalami transformasi signifikan baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, maupun politik. Di bawah kepemimpinan Raden Temenggung Setia Pahlawan Abdul Kadir,

masyarakat Melawi berhasil menjaga kemandirian dan stabilitas di tengah ekspansi kolonial Belanda yang agresif di pedalaman Kalimantan Barat.

Raden Temenggung Abdul Kadir tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga sebagai arsitek utama perekonomian rakyat Melawi. Di tengah tekanan kolonial, ia memperkuat basis ekonomi lokal yang bersumber dari kekayaan alam dan tradisi gotong royong masyarakat Dayak dan Melayu. Sungai Melawi menjadi jalur vital perdagangan hasil hutan seperti rotan, damar, dan padi ladang, yang diangkut ke pusat dagang seperti Sintang dan Pontianak. Ekonomi berjalan dengan sistem barter dan kolektifisme, tanpa ketergantungan pada uang atau sistem tanam paksa kolonial (Pratama, 2020; Fitriani & Nugroho, 2021).

Masyarakat Dayak mengelola ladang berpindah dengan prinsip ekologis, sementara komunitas Melayu mengembangkan kebun lada dan kelapa. Abdul Kadir mendorong pelestarian sumber daya dengan pendekatan konservatif, serta menolak sistem pajak uang, menggantinya dengan kontribusi hasil bumi. Budaya “besame” atau kerja bakti menjadi fondasi sosial dalam produksi dan distribusi ekonomi. Strategi ini terbukti menjaga kemandirian ekonomi

Melawi di tengah penetrasi kolonial (Yuliani, 2018; Syahrani, 2021).

Kepemimpinan Abdul Kadir menciptakan struktur sosial inklusif di tengah masyarakat multi-etnis. Ia menjadi figur pemersatu yang menyatukan kelompok Dayak dan Melayu melalui musyawarah adat, mediasi sosial, dan penguatan hukum adat lokal. Paruman atau forum musyawarah dijadikan sarana dialog antarsuku. Sistem hukum tetap berada di tangan pemuka adat, bukan aparat kolonial. Abdul Kadir juga menjunjung tinggi toleransi beragama dan mendorong partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan kolektif (Pratama, 2020; Fitriani & Nugroho, 2021).

Tradisi gotong royong diperkuat untuk pembangunan rumah betang dan ladang bersama. Kesultanan Melawi menjadi simbol integrasi sosial dan ketahanan budaya. Warisan nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan pluralisme terus hidup dalam masyarakat Melawi hingga kini (Fitriani & Nugroho, 2021).

Abdul Kadir menghadapi tekanan kolonial melalui strategi politik kompromistis. Ia tidak menutup jalur komunikasi dengan Belanda, namun menolak intervensi struktural yang melemahkan otonomi lokal. Upaya Belanda untuk mengisolasi Melawi melalui Kesultanan Pontianak dihadapi

dengan penguatan struktur pemerintahan adat, peningkatan pengawasan jalur sungai, serta pendidikan politik dalam forum musyawarah kampung (Rahardjo, 2019; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019).

Budaya lokal dijadikan alat pertahanan sosial. Tradisi, hukum adat, dan gotong royong menjadi benteng dari penetrasi ideologis dan struktural kolonialisme. Abdul Kadir memanfaatkan diplomasi, jaringan sosial, dan kekuatan kultural sebagai instrumen utama perlawanan non-fisik. Kesultanan Melawi pun tetap eksis sebagai entitas politik otonom hingga menjelang akhir abad ke-19 (Pratama, 2020; Kemendikbudristek, 2022).

### **3. Peran dan Kebijakan Sultan Abdul Kadir dalam Mengelola Pemerintahan Melawi (1845–1875)**

Sultan Abdul Kadir, dengan gelar Raden Temenggung Setia Pahlawan, merupakan figur sentral dalam sejarah local Kesultanan Melawi. Kepemimpinannya tidak hanya ditandai oleh kharisma politik, tetapi juga oleh kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan eksternal seperti ekspansi kolonial Belanda. Ia dikenal sebagai pemimpin visioner yang memadukan politik, sosial-budaya, dan ekonomi dalam satu kerangka pemerintahan berbasis nilai-nilai lokal.

Abdul Kadir menegakkan sistem pemerintahan yang berbasis musyawarah dan hukum adat, di mana masyarakat Dayak dan Melayu dapat berpartisipasi aktif. Pendekatan ini berhasil membangun pemerintahan inklusif, memperkuat legitimasi kepemimpinan, serta meminimalisasi konflik antarsuku melalui forum musyawarah adat dan mediasi langsung oleh Sultan. Strategi ini memperlihatkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang tidak hanya berwibawa secara formal, tetapi juga diterima secara kultural dan spiritual oleh rakyatnya (Pratama, 2020: 151–154).

Sultan juga menjadikan dirinya mediator ulung dalam menyelesaikan perselisihan adat, serta menjunjung tinggi prinsip toleransi antarumat beragama. Ia tidak memaksakan konversi agama kepada kelompok yang masih memeluk kepercayaan lokal, tetapi lebih memilih membangun harmoni melalui pendekatan kultural dan pendidikan spiritual. Di sinilah terlihat model kepemimpinan yang menolak kekerasan dan mengutamakan dialog (Fitriani & Nugroho, 2021; Yuliani, 2018).

Dalam menghadapi tekanan budaya dari kolonialisme, Abdul Kadir menegaskan kembali pentingnya identitas lokal. Ia memperkuat lembaga peradilan adat, menghidupkan tradisi gotong royong (besame), dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam forum adat maupun keagamaan. Semua ini dilakukan untuk memperkuat struktur sosial internal agar tidak mudah terpecah oleh politik *divide et impera* yang dilakukan Belanda (Syahrani, 2021; Fitriani & Nugroho, 2021).

Lebih dari sekadar pelestarian, budaya dijadikan sebagai alat perlawanan non-militer. Abdul Kadir memanfaatkan sistem sosial tradisional sebagai benteng pertahanan terhadap intervensi hukum dan nilai asing, menjadikan hukum adat sebagai sistem penyelesaian konflik yang sah dan dihormati (Pratama, 2020).

Dalam bidang ekonomi, Sultan Abdul Kadir menerapkan kebijakan berbasis kemandirian lokal. Ia mengembangkan sektor pertanian dan hasil hutan sebagai sumber utama penghidupan rakyat. Komoditas seperti rotan, damar, gaharu, dan padi ladang dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan diperdagangkan secara mandiri melalui jalur sungai yang dijaga ketat dari pengaruh kolonial (Yuliani, 2018; Rahardjo, 2019).

Ia menolak dominasi dagang Belanda dengan membatasi masuknya modal asing serta mendorong kepemilikan alat transportasi dagang oleh masyarakat lokal. Sistem perpajakan yang diterapkan pun berbasis kontribusi sukarela sesuai kemampuan rakyat, bukan penarikan

paksa seperti yang lazim dilakukan pemerintah kolonial (Syahrani, 2021).

Strategi ini berhasil menciptakan ketahanan ekonomi rakyat dan memperkuat posisi Kesultanan Melawi sebagai kekuatan lokal yang mandiri secara politik dan ekonomi. Abdul Kadir membuktikan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui prinsip keadilan sosial dan penguatan struktur ekonomi lokal, bukan melalui eksploitasi atau dominasi pihak luar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019; Kemendikbudristek, 2022).

### **Pembahasan**

Berdirinya Kesultanan Abdul Kadir di wilayah Melawi pada pertengahan abad ke-19 dilatarbelakangi oleh dinamika sosial-politik, interaksi budaya, dan tekanan kolonial. Wilayah Melawi saat itu dihuni masyarakat multi-etnis Dayak dan Melayu yang terhubung melalui Sungai Melawi sebagai jalur utama transportasi, perdagangan, dan penyebaran agama Islam (Yuliani, 2018, hlm. 30–31). Sebelum masa Abdul Kadir, struktur kepemimpinan bersifat adat dipimpin para temenggung dengan hukum lokal berbasis animisme dan dinamisme. Namun pengaruh Kesultanan Pontianak dan para ulama mulai mengenalkan Islam ke wilayah ini melalui jalur perdagangan sungai (Yuliani, 2018, hlm. 60–65).

Abdul Kadir, putra Pangeran Urip Abdul Azis Kartiko Aryo Utomo, adalah bangsawan keturunan Matan Tanjungpura yang lahir di Sintang pada 1771. Pendidikan agama dan pengalaman mendampingi ayahnya dalam mediasi adat membentuk kepemimpinannya yang inklusif. Pada 1845, ia diangkat menjadi Raden Temenggung Setia Pahlawan dan disahkan Sultan Sintang atas jasanya menjaga stabilitas dan meredam konflik antarsuku (Pratama, 2020, hlm. 151–154). Pengukuhan sebagai Sultan Melawi disepakati melalui musyawarah adat Melayu dan Dayak sebagai respons atas kekhawatiran kehilangan otonomi di tengah klaim Kesultanan Pontianak yang didukung Belanda (Pratama, 2020, hlm. 174–180).

Kesultanan Melawi dibangun sebagai simbol kedaulatan lokal dengan sistem pemerintahan berbasis musyawarah, hukum adat, dan nilai Islam. Abdul Kadir menolak intervensi kolonial melalui pembatasan perdagangan di bawah kontrol Belanda, penguatan hukum adat, serta diplomasi dengan wilayah tetangga. Strategi perlawanan non-militer ini memanfaatkan solidaritas adat dan pluralisme etnis untuk mempertahankan kemandirian sosial-politik (Kemendikbudristek, 2022; Fitriani & Nugroho, 2021). Dengan demikian, berdirinya Kesultanan Abdul Kadir mencerminkan upaya masyarakat Melawi mempertahankan identitas budaya, hukum

adat, dan otonomi politik dalam menghadapi ekspansi kolonial pada abad ke-19.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran dan kebijakan Sultan Abdul Kadir dalam mengelola pemerintahan Melawi pada tahun 1845–1875, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

### **1. Latar belakang berdirinya Kesultanan Abdul Kadir di Melawi**

Kesultanan Abdul Kadir di Melawi berdiri sebagai kelanjutan dari proses panjang migrasi, konsolidasi kekuasaan lokal, dan pengaruh Islam di pedalaman Kalimantan Barat. Sosok Abdul Kadir, yang berasal dari keturunan bangsawan Melayu dan memiliki legitimasi keagamaan, tampil sebagai figur pemersatu berbagai komunitas yang sebelumnya hidup terpisah antara suku Dayak, Melayu, dan pendatang. Berdirinya kesultanan ini ditandai oleh kebutuhan akan struktur kekuasaan yang kuat dan terorganisir dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal, terutama dari kekuatan kolonial yang mulai memasuki wilayah pedalaman. Kesultanan ini muncul sebagai bentuk kedaulatan politik lokal yang didasarkan pada perpaduan nilai adat, Islam, dan sistem pemerintahan yang inklusif.

### **2. Perkembangan Melawi pada masa Kesultanan Abdul Kadir (1845–1875)**

Selama masa pemerintahan Sultan Abdul Kadir, wilayah Melawi mengalami transformasi signifikan, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Kehidupan sosial masyarakat yang multietnis berhasil diharmonisasikan melalui pendekatan musyawarah, hukum adat, dan nilai gotong royong (*besame*). Di bidang budaya, Sultan aktif menjaga dan mengembangkan identitas lokal dengan memperkuat peran lembaga adat serta mendorong toleransi antaragama dan antarsuku. Dalam bidang ekonomi, Sultan Abdul Kadir menerapkan strategi penguatan ekonomi rakyat berbasis sumber daya lokal, menolak dominasi dagang kolonial, dan menciptakan sistem perpajakan yang adil. Stabilitas sosial dan ekonomi ini menjadi benteng penting dalam menghadapi tekanan kolonial Belanda yang semakin kuat pada paruh kedua abad ke-19.

### **3. Peran dan kebijakan Sultan Abdul Kadir dalam mengelola pemerintahan Melawi (1845–1875)**

Sultan Abdul Kadir memainkan peran strategis sebagai pemimpin politik, kultural, dan spiritual yang membentuk tata kelola pemerintahan Melawi secara holistik. Ia mengembangkan sistem pemerintahan berbasis musyawarah adat, memberdayakan pemimpin lokal, dan menjadikan rakyat sebagai bagian aktif dari pengambilan kebijakan. Dalam

konteks kolonialisme, Sultan Abdul Kadir memilih strategi perlawanan non-konfrontatif melalui diplomasi, penguatan identitas lokal, dan otonomi ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinannya tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga substantif dan transformatif, yang mampu menjaga kedaulatan Melawi di tengah ancaman hegemoni kolonial. Peran dan kebijakan beliau menjadi warisan penting dalam sejarah pemerintahan lokal di Kalimantan Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2020). *Islamisasi dan Kepemimpinan Lokal di Kalimantan Barat: Kasus Kesultanan Sintang dan Melawi*. Pontianak: Penerbit Kalbar Press.
- Azra, A. (2017). *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi. (2023). *Kabupaten Melawi dalam Angka 2023*. Nanga Pinoh: BPS Kabupaten Melawi.
- Fitriani, D., & Nugroho, A. (2021). *Sosial Budaya Kalimantan: Dinamika Multietnis di Pedalaman*. Yogyakarta: Pustaka Humaniora.
- Hariyono, M. (2019). *Sejarah untuk Keadilan: Menulis Sejarah Lokal dan Nasional yang Inklusif*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Haryono, T., & Wulandari, R. (2021). *Geografi Sosial Kalimantan Barat*. Pontianak: Untan Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Penelitian Sejarah Lokal: Modul Pelatihan Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah.
- Kemendikbudristek. (2022). *Usulan Pengangkatan Sebagai Pahlawan Nasional: Raden Temenggung Setia Pahlawan*. Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Pratama, M. (2020). *Kesultanan Melawi: Sejarah, Struktur, dan Silsilah*. Pontianak: Kalbar Press.
- Rahardjo, H. (2019). *Kolonialisme dan Perlawanan di Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Ombak.
- Syahrani, A. (2021). *Hukum Adat dan Identitas Lokal di Kalimantan Barat*. Pontianak: Untan Press.
- Syahrin, M. (2018). *Sejarah dan Budaya Dayak di Kalimantan Barat*. Pontianak: UPT Penerbit Untan.
- Syaifulloh, M. (2023). *Eksistensi Rumah Adat Baluk sebagai Pusat Budaya Dayak Bidayuh Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Tahun 1940–2022*. *Historica Didaktika: Jurnal Sejarah, Budaya dan Sosial*. ISSN 2868-2955.
- Utomo, B. (2021). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Yuliani, S. (2018). *Sejarah Islamisasi Sungai Kapuas dan Anak Sungainya*. Pontianak: UPT Penerbit Untan.